

PENGUATAN DAN INTERNALISASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MELALUI CARA HIDUP BERNEGARA

PIDATO PENGUKUHAN

**JABATAN GURU BESAR DALAM BIDANG ILMU
POLITIK DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
PADA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**



**Oleh :
Bonaventura Ngarawula**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT TERBUKA SENAT
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

Malang, Rabu 1 Juli 2009

s Merdeka
TAKAAN
2
GA



MILIK

PERPUSTAKAAN

UNIV. MERDEKA

**PENGUATAN DAN INTERNALISASI
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
MELALUI CARA HIDUP BERNEGARA**

UNIV. MERDEKA

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Merdeka Malang**

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, Juli 2009

Penulis

DR. Drs. Bonaventura Ngarawula, MS
email : ngarawula28@yahoo.com
bona_kana@yahoo.com

Desain Cover dan Layout : Oqdesain
email : oqdesain@gmail.com

Percetakan PT. Dian Printing
HP. 08123302100

Penerbit

Universitas Merdeka Malang
Jln. Terusan Raya Dieng No. 62 - 64 Malang 65146
Telp. (0341) 568395, Faks : (0341) 564994
<http://www.unmer.ac.id/info.html>
email : info@unmer.ac.id



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MERDEKA MALANG	
Code Buku	No. Register: 399 / H / 2009
352	Tanggal : 03 - 08 - 2009
NGA	Jumlah : 5
p	Copy : -

*"Jikalau kamu tetap dalam FirmanKu,
kamu benar-benar adalah MuridKu dan
kamu akan mengetahui Kebenaran, dan Kebenaran itu
akan memerdekakan kamu," (Yoh. 8 : 31-33)*



Petuah Sang Profesor :

Non Scholae Sed Vitae Discimus

**Kita Belajar Tidak Semata-mata Untuk Ilmu,
Tetapi Untuk Hidup**

PENGUATAN DAN INTERNALISASI PRINSIP-PRINSIP 'GOOD GOVERNANCE' MELALUI CARA HIDUP BERNEGARA

Good Governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development (Koffi Annan, former UN Secretary General).

"Bila Good Governance dan Demokrasi bergandengan tangan, saya yakin mimpi kita terwujud. Pada awal abad ke XXI atau 20-30 tahun dari sekarang, Indonesia betul-betul akan jadi negara maju." (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kompas, 19 Juni 2009)

Yang saya hormati :

- Bapak Danrem 083/Bhaladhika Jaya, selaku Pembina Harian Universitas Merdeka Malang,
- Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur,
- Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang
- Rektor dan Anggota Senat Universitas Merdeka Malang
- Direktur Program Pascasarjana, Para Dekan, para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Merdeka Malang,
- Para dosen dan Karyawan di lingkungan Universitas Merdeka Malang
- Bapak ibu saudara-saudari rekan sejawat dan hadirin para undangan yang saya muliakan.

Pertama-tama saya menyampaikan Puji Syukur dan Terima Kasih yang berlimpah-limpah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan perlindungan dan KaruniaNya kepada kita sekalian yang hadir di sini, pada hari ini, Rabu 1 Juli 2009, dalam keadaan sehat serta dengan suasana bahagia, dalam rangka pengukuhan gelar kehormatan tertinggi di bidang akademik, yakni guru besar kepada saya. Sebagai manusia biasa, secara jujur saya ingin mengungkapkan bahwa saya bangga dengan penghargaan ini, tetapi saya juga menyadari bahwa gelar ini hanyalah langkah kecil saja dari usaha manusia. Sebaliknya penghormatan ini merupakan titik balik karena saya ingin mempersembahkan kembali kepadaNya, Tuhan Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Memiliki, dan Maha Kuasa. Karena semua yang kita peroleh justru berasal dariNya. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan saya dengan topik :

PENGUATAN DAN INTERNALISASI PRINSIP-PRINSIP 'GOOD GOVERNANCE' MELALUI CARA HIDUP BERNEGARA.

Naskah pidato ini saya pilahkan ke dalam lima bagian. *Pertama* : Konsep dan Prakarsa Good Governance, *Kedua* Prinsip dan Parameter, *ketiga* Skenario Penguatan dan Internalisasi, *keempat* Cara Hidup Bernegara, dan *kelima* sebagai penutup saya akan menyampaikan *Ucapan Terima Kasih*

KONSEP DAN PRAKARSA

Para Hadirin Yang Saya Muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pikiran-pikiran mengenai *Good Governance*, membedahnya melalui perspektif penguatan dan internalisasi dalam pengelolaan pemerintahan, menuju pemerintahan yang bersih, *clean government*. Topik ini secara kebetulan menjadi salah satu tema debat para Calon Presiden beberapa waktu lalu dimana sebentar lagi, rakyat Indonesia akan memilih yang terbaik dari mereka. Sebagai seorang ilmuwan yang bergelut dengan sejumlah kajian sosial, sejak lama saya menaruh perhatian terhadap pengelolaan pemerintahan di Indonesia yang sudah terlanjur memiliki stigma *bad governance*. Telaah serta pengalaman yang saya lalui selama ini, baik di daerah maupun di perguruan tinggi, mendorong saya untuk memikirkan lebih jauh bagaimana meletakkan gagasan dan implementasi *good governance* dapat dicerna lebih luas dan adaptif ke dalam realita cara hidup bernegara. Secara moral topik ini merupakan wujud tanggungjawab saya sebagai warga negara untuk terus ikut mencari formula strategis dalam pengelolaan pemerintahan menuju *Clean Government* yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan yang lebih berpihak kepada rakyat (Ngarawula, 2005). Pada awal pidato ini saya mengutip dua pernyataan menarik, pertama dari mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Koffi Anan, dan kedua dari Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi saya, kedua pernyataan tersebut sangat menarik dan tepat, karena tidak hanya membuka perhatian umat manusia terhadap persoalan utama dalam pengelolaan negara, tetapi mengajak keterlibatan negara dan seluruh seluruh komponennya untuk memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap rakyat yang lemah, yang masih didera berbagai persoalan seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, ketidakberdayaan, dan lain sebagainya. Pada pertemuan tingkat tinggi yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan September tahun 2000, para pemimpin dunia mendeklarasikan kesepakatan untuk memasuki abad XXI. Deklarasi tersebut mencakup konsensus bersama mengenai visi dan arah perdamaian dan keamanan global, pembangunan dan pengentasan kemiskinan, hak azasi manusia, demokrasi, dan **GOOD GOVERNANCE**. Kita sudah mengetahui bersama bahwa saat ini deklarasi tersebut menjadi agenda besar dalam *Millenium Development Goals (MDGs)*. Oleh karena itu ketika gagasan *good governance* mulai menggelinding ke berbagai negara, Indonesia sebagai bagian dari peradaban global sudah tentu tidak bisa menutup diri lagi. Sebuah realitas dan tuntutan datang secara bersamaan dengan era reformasi, mendorong negeri ini menuju kepada kematangan berdemokrasi. Kini setelah hampir sepuluh tahun berlalu gaung *good governance* di negeri ini, seola-olah masih berputar dalam wacana, retorika,

dan bahkan lebih untuk konsumsi politik. Secara ekstrim DR. Sjahrir (alm) menyatakan bahwa *good governance* hanyalah sebuah utopia, meskipun telah didukung oleh pemerintahan yang kuat. Saya sendiri berpendapat bahwa *good governance* belum dilihat sebagai sebuah realitas, sebagai pilihan, *point of no return*, *nolens volens*, untuk diterapkan ke dalam cara hidup bernegara.

Para Hadirin Yang Mulia Muliakan.

Mengawali pidato pengukuhan ini, saya perlu mengemukakan secara sekilas ranah teori mengenai *Good Governance*. Sebenarnya gagasan ini bukanlah merupakan hal baru, ia telah ada dan sejalan dengan peradaban manusia, dan di dalam ketatanegaraan sudah lama menjadi perhatian para ilmuwan administrasi negara. Istilah *good governance* pun sudah lama dikenal dalam jagad literatur administrasi publik dan ilmu politik, yakni semenjak 130 tahun silam ketika Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi ilmu Administrasi Negara (Tjokroamidjojo, 2002, Efendi, 2005). Kajian-kajian *good governance* kemudian menjadi semakin populer dan memasuki wilayah keilmuan, sebagaimana dijumpai melalui karya-karya Hume and Turner (1997), Larmour, (1998), Jabbra dan Dwivedi (2005), dan Jreisat (2006), dan MAP UGM (2006). Di Indonesia studi *good governance* lebih banyak muncul melalui kajian mengenai pelayanan publik atau *good governance in public service delivery*. Jika dilihat dari sejarah dan implementasinya, patut kita ketahui bersama bahwa gagasan *Good Governance* sebenarnya tidak terlepas dari peran Bank Dunia dalam usaha untuk memobilisasi pembangunan di berbagai negara. Salah satu embrio mobilisasi pembangunan tersebut adalah ketika diperkenalkan pendekatan pembangunan menyeluruh, *quantum appropriate development*, yang lalu ditransfer ke dalam aras kebijakan negara. Bank Dunia memulainya ketika mencermati fenomena pengelolaan pemerintahan yang pada mulanya terjadi di Afrika, sebagai repons terhadap *the crisis of government in Africa* (World Bank, 1997). Tetapi apa sebetulnya pengertian *good governance* ?

Di Indonesia, pengertian *good governance* agak sulit diterjemahkan secara tepat, karena ia berasal dari literatur Barat. Yang sering kita ketahui *good governance* diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau tata kelola, walaupun sesungguhnya tidak terlalu tepat benar. Karena itu para ahli dan praktisi lebih suka menggunakannya sesuai aslinya saja, *good governance* (Sumarti, 2009). Saya sendiri sering gelisah ketika setiap kali berinteraksi dengan kalangan birokrat bahkan kalangan perguruan tinggi sekalipun, masih menemukan kerancuan dalam menjelaskan pengertian *good governance*. *Good governance* tidak identik dengan *good government*, ia memiliki perbedaan. Kata *Governance* mengandung pengertian semantik, yang bisa diartikan sebagai manajemen suatu negara yang bersifat bijak dan berilmu. Atau seperti yang dirilis Bank Dunia selama ini, *good*

governance merupakan representasi dari *'the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development.* Sejatinya Bank Dunia sendiri lebih suka menggunakan istilah *good public governance* karena dalam perspektif Bank Dunia, *governance* adalah sifat dari kekuasaan yang dijalankan melalui manajemen sumber ekonomi dan sosial negara yang digunakan untuk pembangunan.

Perbedaan paling utama antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan suatu bangsa. Sedangkan istilah *government* berkonotasi dimana peranan pemerintahan yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. *Governance* mengandung makna bagaimana cara suatu negara mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan. Secara umum *good governance* pada intinya bertujuan mengedepankan kemampuan dari kekuasaan negara untuk mengelola pembangunan ekonomi dan seluruh sumber dayanya (Effendi (2005). Dengan kata lain konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan. Sedangkan UNDP (*United Nations Development Program*) memberikan pengertian *good governance* sebagai penggunaan mewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Ia mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. *Good governance can be seen as the the exercise of economic, politic and administratif authority to manage a countrie's affairs at all leves.* UNESCAP (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*) mengartikan *good governance* sebagai sebuah *outcome* yang terdiri dari norma suatu hasil akhir dari suatu proses, ia merupoakan konsep yang merujuk kepada proses pengambilan keputusan dan juga proses bagaimana keputusan itu ditentukan, diambil dan diimplementasikan. Ia juga mempunyai struktur formàl dan informal untuk pelaksanaannya.

PRINSIP DAN PARAMETER

Hadirin yang saya Muliakan.

Sebagai paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan, implementasi *good governance* amat dipengaruhi oleh 3 faktor utama yakni : Pertama adalah : Bentuk rejim politik (*the form of political regime*), Kedua : Proses dimana kekuasaan digunakan di dalam manajemen sumber daya sosial dan

ekonomi bagi kegiatan pembangunan, dan Ketiga 3 : Kemampuan pemerintah untuk mendesain, menformulasikan dan melaksanakan kebijakan, serta fungsi-fungsinya. Dalam perspektif yang berbeda, menurut OECD's *Development Assistance Committee*, *good governance* memiliki kriteria yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut : pembangunan partisipatoris (*participatory development*), hak-hak azasi manusia (*human rights*), demokratisasi (*democratization*), pemerintahan yang mendapat legitimasi (*legitimacy of government*) serta partisipasi masyarakat. Selain itu, peran pemimpin menjadi sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik, yakni : pemimpin yang bervisi strategis dan pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan yang juga mampu mengembangkan potensi anggota masyarakatnya dan menciptakan konsensus di antara semua pihak yang berkepentingan. Prasyarat ini juga dikemukakan *Erna Witoelar*, bahwa *good governance* memiliki makna yang jauh lebih luas, menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta. Ia menunjukkan dua hal penting dalam hubungan ini yakni : Semua pihak harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya, dan adanya saling dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka. Menurutnya masyarakat yang terlibat di dalam pemerintahan yang baik akan mengawasi sektor publik dan sektor swasta serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif pada pemerintahan dan sektor swasta demi berlangungnya pelayanan yang baik bagi masyarakat luas, kemudian masyarakat yang terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan yang menyangkut kepentingan mereka sendiri dan masyarakat. Pandangan lain juga dikemukakan oleh Prof. Bintoro Tjokroamidjojo yang memandang *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral sebagai *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang. Atau Setia Budi (Jurnal Perencanaan Pembangunan, 1997) menunjukkan bahwa *good governance* menyangkut sejumlah kriteria yang saling terkait satu sama lainnya yakni akuntabilitas, transparansi (*openness and transparency*), ketaatan pada aturan hukum, komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara dan bukan pada kelompok atau pribadi, dan komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mensyaratkan empat azas yakni transparansi, pertanggungjawaban, dengan pengertian transparansi yang bermakna tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Saya mengartikannya sebagai sebuah suasana kondusif dari pemerintahan yang pro rakyat, yang tercermin melalui pelayanan yang baik, dan komitmennya

pada tujuan menyejahterakan rakyat (Ngarawula, 2007). Melalui perpanjangan tangannya sejumlah lembaga, baik tingkat multi lateral atau bilateral memberikan rekomendasi menarik mengenai karakteristik *good governance*.

Kriteria *Good Governance* menurut United Kingdom/ODA=*Overseas Development Administration*, mengacu kepada legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum/hak-hak azasi manusia Konsep ini merujuk kepada aspek normatif pemerintahan yang digunakan dalam menyusun berbagai kriteria dari yang bersifat politik hingga ekonomi. Yang juga dirumuskan untuk kebijaksanaan pemberian bantuan luar negeri khususnya kepada negara-negara berkembang. Saya ingin membawa gagasan *good governance* tidak lagi pada sebatas retorika, atau lebih untuk konsumsi politik, tetapi ke dalam cara hidup bernegara. Jika kita mencermati publikasi ilmiah yang telah dilansir, diperoleh penjelasan mengenai sejumlah kriteria dari *good governance*. Di Indonesia Departemen Dalam Negeri, UNDP, UN Habitat, APKASI, dan ADEKSI (2003), merumuskan sepuluh kriteria *good governance*, yakni : kesetaraan (*equity*), pengawasan (*supervision*), penegakan hukum (*law enforcement*), daya tanggap (*responsiveness*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectivity*), partisipasi (*participation*), profesionalisme (*professionalism*), akuntabilitas (*accountability*), wawasan ke depan (*vision*), dan transparansi (*transparency*). Sedangkan BAPPENAS menawarkan empat belas unsur penting dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Ke empat belas unsur tersebut adalah : wawasan ke depan (*visionary*), keterbukaan dan transparansi (*openess and transparency*), partisipasi masyarakat (*community participation*), tanggungugat (*accountability*), supermasi hukum (*rule of law*), demokrasi (*democracy*), profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*), daya tanggap (*responsiveness*), keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*), desentralisasi (*decentralization*), kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat (*private and civil society partnership*), komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequity*), komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environment protection*), dan komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*). Selain kriteria yang diajukan di atas, diperlukan iklim yang kondusif dan strategis terhadap penerapan *good governance*. Iklim kondusif yang dibutuhkan antara lain dikemukakan Sumarti (2009), yang mengajukan kriteria : Pertama adalah perlunya sebuah pra kondisi dengan tipologi pemerintahan baru yang berkomitmen tinggi terhadap aplikasi *good governance*, kedua diperlukan kekuatan *civil society*, ketiga didukung kemampuan teknis dan manajemennya, keempat perlunya ruang partisipasi publik termasuk pilar-pilar otodanya, dan kelima didukung moral budaya bangsa dan iklim demokrasi yang tumbuh secara alamiah.

SKENARIO PENGUATAN DAN INTERNALISASI

Hadirin Yang Saya Muliakan.

Jika memperhatikan pengertian, prinsip, dan kriteria sebagaimana saya kemukakan di atas, maka yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana menjadikan *good governance* beserta prinsip-prinsip yang dianutnya, memiliki kemampuan dan terinternalisasi ke dalam pengelolaan pemerintahan serta cara hidup bernegara ?. Sejumlah ahli mengemukakan bahwa paradigma baru pemerintahan sebagai perwujudan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberi pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Eleine Kamarck (2004), mengatakan bahwa sebuah pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang di dalam pengelolaannya dapat menjalankan efisiensi (*government that costs less*), yang memiliki kualitas (*quality government*), yang profesional (*profesional government*), yang menggunakan pengelolaan secara digital (*digital government*), memiliki tata aturan yang terumuskan dengan baik (*better regulated government*), dan pemerintahan yang jujur dan transparan (*honest and transparent government*). Seperti apakah wujud pemerintahan yang konsern dalam pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyatnya ?. Dalam hubungan ini, Tich Nhat Tu (2007), mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik akan tercermin pada tata kehidupan masyarakatnya. Ia mengajukan beberapa ciri masyarakat ideal di dalam pemerintahan yang baik yakni masyarakat yang memiliki moral yang baik (*a moral society*), masyarakat yang memiliki kecerdasan (*a rational society*), masyarakat yang berbudaya (*a cultural society*), masyarakat yang memiliki kesetaraan (*an equal society*), masyarakat yang mengedepan nilai-nilai kemanusiaan (*a humanistic society*), masyarakat yang peduli dengan lingkungan sosialnya (*an altruistic society*), masyarakat yang harmonis (*a harmonious society*), dan masyarakat yang memiliki keseimbangan nilai-nilai dalam kehidupan. Tetapi cara hidup bernegara tidak akan terjadi dengan sendirinya, tanpa didukung oleh peran negara. Tawaran menarik mengenai peran negara di dalam merubah perilaku hidup bernegara melalui pencerapan *good governance* dikemukakan Francis Fukuyama (2004). Menurutnya negara pada dasarnya merupakan elemen penting dalam pembangunan dan kelangsungannya. Tetapi dalam perkembangannya negara ternyata belum mampu memberikan peran-peran lebih di dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya seperti umumnya yang terjadi di negara-negara berkembang. Perlu ada solusi memberikan penguatan peran negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada rakyat, untuk selanjutnya dapat merubah perilakunya di dalam kehidupan bernegara. Untuk maksud ini Fukuyama mengklasifikasikan peran negara berdasarkan fungsinya menjadi tiga tingkatan yakni negara dengan fungsi minimal, negara dengan fungsi menengah dan negara dengan fungsi aktivis. Penguatan ini bertujuan agar negara mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perlunya dukungan semua elemen dalam

mewujudkan perilaku kehidupan bernegara dipertegas pula oleh *Institute on Governance* yang menilai bahwa negara dan pilar-pilar penunjangnya perlu mengembangkan pembentukan kemitraan yang solid dan dan searah. Kemitraan tersebut mencakup level legitimasi dah hak suara bahwa setiap orang menginginkan hak, maka diperlukan forum untuk mempertemukan kemitraan, forum tersebut menjadi media untuk menampung berbagai aspirasi, yang kemudian bisa dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan bersama. Selain itu diperlukan pula kesamaan visi, kualitas kinerja, akuntabilitas, serta sikap jujur satu sama lain yang menjadi aset penguat perubahan perilaku tersebut. Dengan begitu tingkah laku hidup bernegara akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari sebagai pencerminan pengatan otoda sebagai mana dilasnr oleh Komite Nasional Gerakan *Governance* (2008). Dalam konteks peran negara yang diperlukan adalah menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang beorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Selain itu melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang didasari pada kaidah yang mendalam serta melibatkan masyarakat dan dunia usaha, melakukan diseminasi dan sosialisasi terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta meningkatkan kemampuan warga negara dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial politik. Memastikan agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara mematuhi dan memberdayakan sistem hukum nasional. Menerapkan etika penyelenggara negara secara konsisten dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mengupayakan kesejahteraan yang memadai serta menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggara negara dan jajarannya untuk memungkinkan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dengan baik. Membangun iklim persaingan usaha yang sehat dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Sedangkan Dunia Usaha memiliki peran antara lain : Melaksanakan usaha secara sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta meningkatkan kesempatan kerja, membangun sistem yang dapat memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta melaksanakan *good corporate governance* secara konsisten, melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme, melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap usahanya, memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung, mengenai peran masyarakat sendiri dikemukakan bahwa masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan

bertanggungjawab, meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat menata dan menciptakan sistem dan organisasi masyarakat yang sehat. Mencegah dan menghilangkan sikap dan perilaku koruptif, kolusif, dan nepotisme. Melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan, memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab dalam pemilihan penyelenggaraan negara. Pentingnya penguatan terhadap pilar-pilar utama dalam kehidupan bernegara menurut Sutoro Eko (Analisis CSIS, 2004), sekaligus memperkuat pula kelangsungan pemerintahan yang bersih dan bertatakelola. Untuk itu menurutnya negara dan masyarakat memainkan peran-peran in kind secara lebih optimal. Negara sebagai agen memiliki crafting elite, konvergensi elite dan kepemimpinan yang kuat akan menghasilkan kerangka kebijakan dan legalitasnya. Ia akan melaksanakan *capacity building* dan berorientasi kepada reorganisasi dan reformasi birokrasi. Sedangkan masyarakat memerlukan penguatan pada pendidikan politik, penguatan pada aktor-aktor masyarakat sipil yang akan diperkuat modal sosialnya, menumbuhkan partisipasi masyarakatnya serta menjadikan aksi kolektif masyarakat sipil. Gubernur Gorontalo, Fadel Muhamad (2008), dengan formula FM, di dalam menerapkan tata pemerintahan yang baik mengemukakan bahwa pengelolaan sejumlah kondisi penunjang pelaksanaan *good governance* adalah prasyarat penting didukung kinerja pemerintah yang merupakan *proxy* untuk melihat kualitas *good governance*, dimana semakin baik kinerja pemerintah, maka akan semakin baik pula implementasi *good governance*, termasuk di dalamnya adalah cara hidup bernegara dari semua elemen negara.

CARA HIDUP BERNEGARA

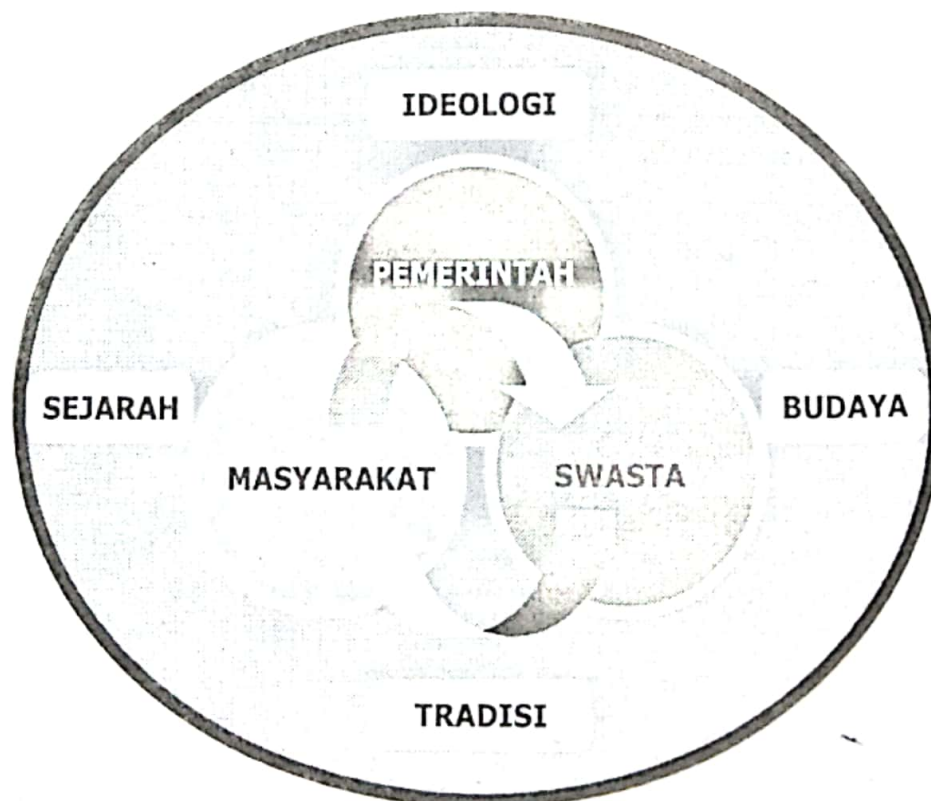
Hadiri yang Saya Muliakan,

Dari sejumlah pendapat dan kajian yang saya kemukakan di atas, perlu dipikirkan dan disegarkan kembali upaya untuk melakukan internalisasi dalam penerapan *good governance* sebagai sebuah cara hidup bernegara. Bagi saya hal ini penting karena *good governance* dengan sejumlah prinsip dan kriteria idealnya tidak terus membias hanya dalam wacana, retorika, dan yang lebih tidak menguntungkan adalah hanya untuk konsumsi politik, tapi justru terinternalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengelola pemerintahan maupun warga negaranya. Kita memiliki potensi untuk mengembangkan *good governance* ke dalam cara hidup bernegara. Dalam gambar di bawah, saya menunjukkan skenario pengembangan dan internalisasi prinsip-prinsip *good governance*. Bahwa otonomi daerah yang ditopang oleh tiga pilar utamanya yakni : Pemerintah (eksekutif dan legislatif), swasta (*private sector*) dan masyarakat (*community base*), sesungguhnya bukanlah sebuah pilar yang berdiri tanpa pijakan. Ketiganya

dilingkupi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam empat komponen utama di dalam peri kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat komponen tersebut adalah nilai-nilai (*values*), sejarah (*history*), tradisi (*traditions*), dan kebudayaan (*culture*). Nilai yang paling hakiki dan yang menjadi pedoman hidup manusia adalah agama. Dan agama merupakan salah satu komponen hierarkis yang memberi arah mengenai cara hidup manusia di dunia ini menurut ajaran agama masing-masing. Agama mengajarkan tentang kebenaran dan manusia tinggal memilih *bad side* dan *good side* (Nhat Tu, 2007). Komponen kedua adalah sejarah dari suatu bangsa yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga setiap negara di dalam membangun hubungan antara negara dan warga negaranya. Indonesia mempunyai pengalaman panjang di dalam hal ini, kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, dan 3½ tahun oleh Jepang, setelah merdeka kita masih dijajah lagi oleh pemerintahan yang lebih berpihak pada elite dan kekuasaan, juga pemerintahan yang otoriter (Pramusinto, 2006). Dalam masa kolonial, negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin mengalami pengalaman pemerintahan yang kurang menguntungkan. Pengelolaan pemerintahan yang menyimpang dari tujuannya, merugikan rakyat dengan terjadinya praktek *bad governance* seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Gejala ini ditandai dengan pemimpin-pemimpin negara yang otoriter, menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik, dengan model demokrasi yang dualistik, di satu sisi sangat dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa dan di sisi lain oleh lingkungan yang dihadapi pada zamannya. Indonesia sendiri dengan pengalaman pemerintahan dari sebuah rezim yang otoriter selama 32 tahun, telah mengalami praktek pemerintahan yang *bad governance* (Shutmuller, et.al, 2004). Indikasinya adalah kurang terbukanya pengelolaan negara, tertutupnya ruang partisipasi publik, kebijakan-kebijakan negara yang lebih ditentukan oleh kekuasaan, dengan kekuasaan yang bersifat authoritarian dan represif. Perkembangan yang kurang kondusif ini membawa bangsa-bangsa di dunia pada umumnya, Asia dan Afrika dan Indonesia pada khususnya, terjebak ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak pro rakyat. Perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan yang baik juga bermula usai runtuhnya Uni Sovyet, jatuhnya ideologi dan sistem komunisme dan menuju kepada ideologi dan sistem liberal. Pengelolaan negara mulai diarahkan kepada persoalan-persoalan yang dirasakan langsung oleh rakyatnya. Anthony Giddens dalam bukunya *The Third Way, The Rise of Social Democracy* (2000) mengemukakan bahwa kehidupan bernegara dan bermasyarakat pada prinsipnya harus menghargai perlindungan HAM, menjalankan ekonomi pasar yang sehat, dimulai dari pemanfaatan mekanisme pasar dalam pengelolaan dan transaksi ekonomi, kebijaksanaan politik yang lebih ditentukan oleh rakyat melalui sistem perwakilan atas dasar pemilihan umum yang jujur dan adil, penegakan hukum, kebijakan-kebijakan yang lebih memperhatikan *sustainability* dari lingkungan, dan *good governance* berdasarkan sinergi dan kordinasi yang baik antara sektor

publik dan masyarakat (*community base*) yang akuntabel. Menilik pengalaman yang kurang menguntungkan di atas, beberapa negara mulai menerapkan sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada publik. Vietnam melalui kebijakan reformasi yang komprehensif, *Doi Moi*, telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pembangunan dan keterlibatan rakyatnya.

Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi kita dan setiap negara bangsa untuk membangun ke arah yang lebih baik. Selain itu komponen berikutnya adalah tradisi atau warisan yang ditinggalkan para leluhur kita yang memiliki ajaran-ajaran yang berharga dalam membangun hubungan antara sesama manusia dan kebersamaan dalam kehidupan berkomunitas (Thohir, 2009), dan kemudian kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa dan rasa dari manusia. Saya ingin mengatakan bahwa ke empat komponen itu justru menjadi penting di dalam mendorong pengembangan dan internasialisasi *good governance* di dalam cara hidup bernegara. Meskipun demikian, itu baru dapat dilakukan jika pemerintah mempunyai komitmen dan memberi tempat terhadap ke empat komponen tersebut.

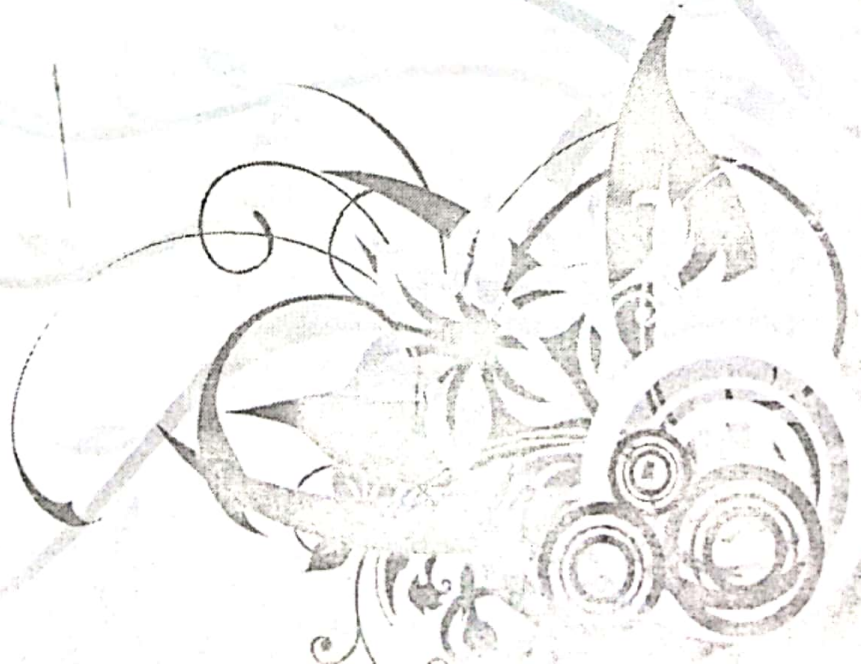


Gambar :
Skenario Penguatan dan Internalisasi
Good Governance Melalui Cara Hidup Bernegara

Kiranya langkah menuju perilaku kehidupan bernegara tidak cukup hanya dibangun melalui skenario sebagaimana dikemukakan diatas. Diperlukan *political will* tidak hanya dari pemerintah tetapi semua pilar utama penegak otonomi daerah. Jika demikian maka sesungguhnya internalisasi prinsip-prinsip *good governance* dalam cara hidup bernegara, bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi justru merupakan sebuah proses alamiah yang berlangsung pada setiap individu bernegara. Jadi, mengapa tidak mulai saat ini kita mengembangkan dan melakukan penguatan dan internalisasi prinsip-prinsip *good governance* ? Mengapa bias retorika masih lebih dominan dari pada komitmennya? Atau mengapa kepentingan politik melalui jargon-jargon yang populernya hanya sesaat, justru lebih disukai ?

Hadirin yang saya muliakan,

Inilah sebagian kecil dari pikiran saya mengenai penguatan dan internalisasi prinsip-prinsip *good governance*, yang tentu saja masih harus dikaji kembali melalui penelitian-yang lebih terfokus dengan pembahasan melalui forum-forum akademik. Saya mengajak dunia akademik untuk ikut memikirkan mengenai hal ini, melakukan jelajah ilmiah tanpa henti, agar bisa memberikan kontribusi bermakna bagi negeri ini, selain sebagai orang beriman, kita senantiasa memberi makna dalam mengisi hidup ini. Sekian dan Terima kasih.



UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin Yang Saya Muliakan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan syukur dan terima kasih saya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan membantu saya selama ini, terutama dalam masa suka dan duka menjalani studi Program S-3 baik saat di Universitas Airlangga Surabaya maupun ketika menyelesaikannya di Pascasarjana Unmer Malang. Ucapan terima kasih setinggi-tinggi kepada pemerintah Republik Indonesia dimana melalui Keputusan Mendiknas Nomor : 4436/A4.5/KP/2008, tanggal 2 Juni 2008 saya diberikan kehormatan dan mendapatkan jabatan Guru Besar di bidang ilmu Kebijakan Otonomi Daerah dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Merdeka Malang. Terima kasih dan penghormatan patut pula saya sampaikan kepada para Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang yang telah memberi tempat pada saya untuk meniti karier sebagai dosen di lembaga ini. Pertama tama, Yth. Bapak Kol (Purn) Matrodji, Bapak Brigjend (Purn) Sugiyono (alm), Kol. (Purn) dr. H. Soemadi Abdullah, SPD, Kol. (Purn) Ir. Albiadi, SE, dan Ketua Umum Yayasan Perti Merdeka Malang saat ini Bapak Kol. (Purn) Toegino, SE, Demikian pula terima kasih dan penghormatan saya setinggi tingginya kepada para Rektor Unmer Malang sejak periode 1978 hingga saat ini. Pertama-tama Brig.Jend (Purn) alm. Wachman, Kol (Purn) Hari Mulyono, SH, (alm), DR (HC). dr. H. Wahjoetomo, SPD dari beliau saya banyak belajar mengenai etos kerja, makna kompetensi dan kompetisi, dan dari beliau pula saya belajar mengenai objektivitas tanpa mengenal batas-batas perbedaan yang tidak menguntungkan dan menjerumuskan dunia akademik. Juga kepada dr. H. Rusman, SPJ yang dengan bijak dan sabar memberikan perhatian serta dorongan moril kepada saya, dengan terus mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan studi sewaktu di Program S-3. Kepada bapak DR. H. Budi Siswanto, MSi, baik sebagai rektor maupun kolega, yang dengan caranya sendiri mendorong saya untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas-tugas akademik.

Kepada Rektor Unmer Malang saat ini ibu DR. Kridawati Sadhana, MS, serta para Wakil Rektornya yang telah memberikan dukungan dan fasilitas pengabdian kepada saya. Kepada Dekan FISIP Unmer Malang semenjak periode bapak Poernomo Djajengsoebroto, SH, (alm), bapak AMK Bharata, SH (alm), Drs. Matkasan Soetardjo (alm), Drs. H. Soekadi, MS, Prof. DR. H. Agus Sholahuddin, MS, DR. Kridawati Sadhana, MS, dan ibu Dra. Roos Wijayani, MSi. Kepada para kolega saya selama masa pengabdian di Lembaga Penelitian Unmer Malang periode 1992 - 2000, saya sebutkan satu per satu : kepada bapak Ir. A. Tutut Soebadio, MSL, Prof. DR. Hj. Djumiati, MM, Prof. DR. Hj. Widji Astuty, MM, bapak Drs. Catur Wahyudi,

MA, F. Rahardjo, SH, MH, Drs. Sukardi, MSi, Prof. DR. Anwar Sanusi, MSi, bapak Muhari Agus, SH, MS, Ir. Boni Nurhamdoko, serta ibu Kadek Wiwik SH, MH. Juga kepada para staf saya pada masa itu, bapak Heru Budi Susetyo, ibu Enny Suppto, BA, bapak Mustaman, bapak Eddy Yusuf, Ahmad Djafar, Saya berterima kasih kepada mereka semua karena kinerja kami pada masa itu diakui banyak pihak di kampus ini sebagai amat berhasil dan mampu memikat publik yang berminat di dunia ilmu pengetahuan.

Kepada Ketua Senat Universitas, ibu DR. Kridawati Sadhana, MS, serta para anggota Senat Universitas Merdeka Malang saya mengucapkan terima kasih atas pertimbangan dan kemudahan terhadap usulan guru besar saya sehingga memberi jalan kepada saya untuk mengikuti proses lebih lanjut.

Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan dan hormat setinggi-tingginya kepada bupati Kabupaten Ende- Flores, bapak Drs. Don Wangge, MSi yang berkenan hadir dalam acara ini. Ketika saya menghubungi beliau untuk acara ini, secara spontan beliau menyatakan mau hadir dan ambil bagian. Saya memang tidak kaget, karena saya tahu betul komitmennya dalam mengembangkan pendidikan di daerah saya, beliau tidak memang setengah-setengah, baik ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun saat ini sebagai bupati Ende. Kesempatan yang berbahagia ini saya juga menyampaikan hormat dan terima kasih banyak kepada Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Flores, bapak Herman Joseph Gadidjou, Drs. Ekon. (beliau pernah menjabat sebagai bupati Ende selama 2 periode), dan ibu Emma Gadidjou. Saya masih ingat betul dulu waktu lulus SMA Seminari di Mataloko, saya punya cita-cita melanjutkan studi ke APDN di Kupang. Saya dan ayah saya datang ke kantor bupati, di Jln. Sukarno, ayah saya berhasil menemui bupati dan katanya saya sudah diperjuangkan beliau untuk bisa lolos ke APDN di Kupang. Tetapi karena saya datang terlambat ternyata saya tidak bisa diterima. Herannya waktu itu saya kok tidak kecewa dan ternyata membawa hikmah bagi saya. Kini setelah kurang lebih 30 tahun berlalu, sejak tiga tahun lalu saya malah diminta oleh beliau dan rektornya, untuk membantu mengajar di Universitas Flores pada setiap semester. Bahkan beberapa kali saya menjadi nara sumber untuk para dosen dalam pengelolaan penelitian dan jurnal. Tidak berhasil ke APDN malah bangga sebagai dosen terbang di Unflor, sebuah profesi yang pasti membanggakan bagi setiap penggiat akademik. Juga kepada Rektor Universitas Flores, bapak Frans Badhe, SH, MH yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdikan kepada daerah saya sebagai dosen tamu di Universitas Flores Ende pada setiap semester. Kepercayaan ini akan tetap saya jaga semata-mata demi pengabdian kepada daerah dan tanah kelahiran saya.

Saya juga menyampaikan hormat dan terima kasih kepada senior dan guru saya, P. DR. Paul Klein, SVD yang selama ini sering berdiskusi

399/70/2009
MILIK W/S - Roda

mengenai bidang ilmu yang baru buat saya, yakni Teologi Moral dan Keluarga. Terima kasih atas pendapat dan pandangan-pandangan kritis dan konstruktif yang selama ini saya terima dalam diskusi-diskusi di desk redaksi kami. Bersama beliau, saya mengolah Majalah Keluarga KANA, sebagai pemimpin redaksi. Majalah KANA adalah sebuah majalah keluarga dengan scope nasional dan dari waktu ke waktu oplahnya terus meningkat. P. DR. Paul Klein, SVD adalah Pemimpin Umum/Penanggungjawab Majalah ini. Saya juga menyampaikan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Provinsial Frateran BHK, Fr. M. Damianus, SH dan Pimpinan Yayasan Mardiwiyata, Fr. DR. M Monfort, BHK, SE, MPd, pertama karena mereka telah membantu menyediakan fasilitas dan kelengkapan untuk acara hari ini. Kedua, karena beberapa kali memberi kepercayaan kepada saya untuk membantu para frater dan para guru di lingkungan Yayasan Mardiwiyata dalam pembinaan SDMnya. Kepada para guru saya yang tidak dapat saya lupakan, guru SDK Mukusaki tempat saya belajar selama 6 tahun dimana kala itu saya lulus dengan cemerlang berkat jasa-jasa mereka. Hormat dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Sekolah SD saat itu dimana saya belajar, bapak Paulus Pendi (86 tahun), yang tidak lain adalah ayah saya sendiri, beliau kini sedang tergolek lemah karena sakit sejak awal Januari 2009 lalu, kepada bapak guru Thomas Mboro, Eduardus Ea, dan Anas Nggera, juga kepada para guru saya ketika saya belajar di SMPK Ndao-Ende Flores, sebuah sekolah menengah pertama yang hingga saat ini menjadi sekolah terfavorit di Propinsi NTT, saya bangga dengan sekolah ini, saya bangga dengan guru-guru saya bapak Markus Halan/Fr. M. Karolus (alm), Fr. M. Albertus, BHK, Fr. M. Valens, BHK, Fr. M. Klemens, BHK, Fr. M. Klementinus, BHK, (alm) Fr. M. Donatus, BHK, (alm), Fr. M. Amandus, bapak guru Anton Tony (alm), guru Ilmu Ukur yang tidak saya lupakan bapak Yan Benga Makin, bapak Paul, bapak Yoseph Tote Mbiri (alm), demikian juga kepada guru-guru saya sewaktu saya belajar di SMA Seminari Mataloko Flores. Sekolah ini juga sangat berkualitas dan paling favorit di NTT, bahkan hingga di wilayah propinsi lainnya. Terima kasih dan hormat saya setinggi tingginya kepada P. Willy Lehmann, SVD, yang menjadi rektor ketika saya belajar di sekolah ini, P. Alfons Engels, SVD guru bahasa Jerman dan Biologi yang juga merangkap sebagai 'dokter' di sekolah saya. Ketika bertemu beberapa tahun lalu, beliau masih ingat deretan kursi di mana saya duduk ketika itu. Juga kepada P. Kurt Bart, SVD yang menjadi guru bahasa Jerman dan bapak asrama, ketiga nama yang saya sebut ini adalah para misionarist Jerman yang mengabdikan diri di lembaga ini. Juga kepada P. Jan Kozlowski, SVD guru kimia saya, ia juga seorang misionarist berkebangsaan Polandia, yang dikenal cekatan dan penuh semangat di dalam membimbing kami siswa-siswanya kala itu. Saat ini beliau sudah kembali ke negerinya di Polandia. P. Yan Lobi, SVD, bapak Mikael Remi, BA, Peter Kleofas, BA, Markus Mbulu, BA, bapak Yan Djangun, sebagian besar

dari mereka masih sempat saya bertemu dan bernostalgia ketika reuni Seminar Mataloko pada pesta Intan 75 Tahun, pada tahun 2004 lalu.

Kepada para dosen saya sewaktu masa belajar program sarjana di FISIP Unmer Malang bapak AMK, Malik Bharata, SH (alm), bapak Poernomo Djajengsoebroto, SH (alm), bapak Seonarto DD, BA (yang kini Ketua Yayasan Universitas Kanjuruhan Malang), bapak Drs. Antonius Busono, BSc dan para dosen saya dari Universitas Jember, bapak Drs. Sandjaja, MSi, Prof. Drs. Tukidjan, Drs. Soenarjo Danuwasi, Kepada para dosen saya pada masa studi S-2 Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, kepada pembimbing utama saya Prof. DR. Affan Gafar (alm), dan Prof. DR. Yahya A. Muhaimin, MA yang pernah menjabat sebagai Mendiknas RI, Prof. DR. Amien Rais, MA yang saya ingat betul kalau mengajar mata Kuliah Masalah-Masalah Timur Tengah, beliau tidak pernah membawa literatur tetapi seolah menuangkan ilmunya kepada kami begitu lengkap, juga kepada Prof. DR. Ichlasul Amal, Prof. DR. Mochtar Mas'ood, MA, dan Prof. DR. Budi Winarno, MA.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen saya ketika saya melanjutkan studi S-3 di Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Soetandyo, SH, MPA, Prof. DR. Ramlan Surbakti, MA, DR. Dede Oetomo, MA, Dr. dr. Widodo yang telah memberikan banyak bekal pengetahuan kepada saya selama menjalani studi S-3 di Universitas Airlangga hingga penyusunan pra proposal yang kemudian dari situ saya bisa menyelesaikannya pada Program S-3 di Unmer Malang. Tidak lupa saya mengucapkan terima kepada bapak Arie Priyono, SH dan bapak Warsito keduanya telah dengan sabar dan baik hati melayani proses pengajuan guru besar hingga turunnya Keputusan Menteri. Kemudian kepada orang-orang dekat saya yang paling saya kasihi dalam hidup saya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang tidak pernah kenal lelah memberikan dorongan kepada saya. Kepada ayahanda saya terkasih bapak Paulus Pendi yang saat ini masih tergelek lemah, kehilangan kesadaran karena sakit stroke, tidak ada kata yang pantas saya haturkan kepada beliau, jasa dan pengabdian serta totalitas sebagai ayah sungguh amat luar biasa menandai perjalanan hidup saya. Saya bangga ayah saya telah menorehkan sejarah penting tidak hanya dalam perjalanan hidup dan karier saya, tetapi juga bagi masyarakat di desa saya dan bahkan di Kabupaten Ende tempat saya berasal. Kepada ibunda saya Martha Mea (†alm, 1983) saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang tidak terhingga karena doa beliau sebagai ibu sudah dibuktikan hingga akhir usianya. Kiranya Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Mendengar, menerima almarhumah di sisiNya, ananda selalu menyertai ibunda terkasih. Pada saat yang berbahagia ini dari keluarga saya memang tidak ada yang bisa mengikuti acara ini. Kakak-kakak saya Yohanes Berkhmans Wara dan Maria Sona yang menetap di kampung halaman, karena masih berkonsentrasi merawat ayah saya, mereka selalu berdoa dan

memberikan dorongan moril dalam tugas-tugas saya. Kedua adik saya, Beatrix Ety Surya, BA dan suaminya Tarsisius Meo, BA, Ludgardis Wonga Wara, S, Sos dan suaminya Drs. Hyerominus Wara, mereka semua kini bertugas di Merauke Papua sebagai guru SMP dan SMA, belum lama ini kami sudah berkumpul bersama dalam rangka merawat ayah kami yang sakit. Karena jarak yang jauh dan hambatan tugas, tidak memungkinkan mereka bisa hadir dalam acara ini. Tetapi yang lebih penting dari segalanya adalah doa dan dorongan moril yang sudah mereka berikan buat saya. Adik-adik saya Yosaphat Angi Wara dan Ferdinand Kurniawan Radawara yang tidak bisa meninggalkan tugas-tugas mereka baik sebagai kepala desa maupun sebagai PNS di Kabupaten Ende, juga telah memberikan doa dan dorongan moril kepada saya. Kepada mereka semua saya menyampaikan terima kasih banyak atas segala dukungan, doa dan kebersamaan selama ini.

Kepada ibu dari anak-anak saya, dr. Hj. Susilowati, MARS yang telah menunjukkan pengabdian sebagai seorang istri dan ibu, dan yang tak kenal lelah mengingatkan saya akan pentingnya menjalani tugas keilmuan ini sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya dan pada akhirnya meraih gelar terhormat ini. Sebagai istri, ibu dr. Hj. Susilowati, MARS menunjukkan perjuangannya sebagai partner sejati, dalam suka dan duka, dalam segala persoalan hidup dan kehidupan. Saya menemukan seseorang yang tidak pernah pudar dalam cinta dan pengorbanannya. Kepada kedua anak saya Eka Nugraha Putra dan Martha Dewi Caesa Putri, terima kasih banyak atas segala pengorbanan dan pengabdian kalian sebagai anak-anak saya. Ayahmu tidak bisa memberi banyak kepada kalian, namun ayahmu yakin, peristiwa penting hari ini akan ikut menandai tugas kalian sebagai mahasiswa dan masa depan kalian.

Akhirnya perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang dengan sabar dan hikmat mengikuti dan mendengarkan pidato pengukuhan saya serta mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan yang mungkin terucap dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga amal baik bapak ibu para hadirin sekalian akan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Kuasa dan Maha Besar. *Amin !*

Kiranya Tuhan Memberkati kita sekalian.

Malang, Hari Rabu, 1 Juli 2009

Bonaventura Ngarawula

DAFTAR PUSTAKA

- Abdellatif, Adel M, 2003, '*Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development*, Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, Workshop-IV, Democracy, Economic, and Culture
- Anderson, H, '*Good Governance and NGOs in Contemporary Indonesia*,
- Bell, F. Gary, 2004, '*Decentralization in Indonesia, Theory and Practice*, Jurnal Hukum dan Bisnis, Volume 23 No.1 tahun 2004.
- Daniri Rachmad, Mas, '*Good Governance, Menyongsong Tahun 2008 Dengan Berbekal Good Governance*
- Darmansjah, Iwan, 2002 '*Menciptakan Good Governance*, '
- Sudrajat, Prasetyo, '*Good Governance Sebagai Gerakan Nasional*, 'Build UNDP, UNHCS
- Dwiyanto, Agus, 2002, '*Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Edgar Laura, et al, 2006, '*Partnerships : Putting Good Governance Principles in Practice*, 'Institute on Governance
- Effendi, Sofian, 2005, '*Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*, 'makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi, diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara PAN, Jakarta
- Effendi, Taufik, 2007, '*Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*.
- Fukuyama, Francis, 2004, '*State Building : Governance and World Order in The 21st Century*, Cornell University, New York,
- Giddens, Anthony, 2000, '*The Third Way, The Rise of Social Democracy*' (Terjemahan, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ganie, Meutia, 1999, '*Good Governance : Prinsip, Berbagai Komponen, dan Penerapannya*, 'Jurnal Transpransi Online,
- Harahap, Dumasari, HJj, 2006, '*Good Governance = Tugas Kita*
- Harsch Ernest, 1997 '*Making Good Governance Reality*, ' Africa Recovery Nations
- Kaloh, J, 2007, '*Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam*

Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Penerbit Rineka Cipta,

Kartasasmita, Ginanjar, 2001, *'Good Governance dan Pembangunan Birokrasi*, makalah disampaikan pada Silaknas ICMI di Jakarta

Komite Nasional Kebijakan Good Governance, 2008, *'Pedoman Umum Good Public Governance*.

Mohamad, Fadel, 2008, *'Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik, Pengalaman Pemerintah Propinsi Gorontalo*, makalah disampaikan pada Workshop Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah, Jakarta

Ngarawula Bonaventura, 2007, *'Kesiapan Kawasan Utara Kabupaten Ende, Flores, NTT Dalam Menyongsong Pembangunan*,['] handout disampaikan pada Diskusi Publik bersama DPRD Kabupaten Ende

_____, 2005, *'Optimalisasi Peran DPRD Dalam Mengatasi Masalah PHK*, makalah untuk pembekalan Lokakarya dihadapan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Jatim.

_____, 2004, *'Strategi Membasmi Korupsi di Daerah*, makalah selaku tim ekspert untuk Penelitian tentang Monitoring Otonomi, The Jawa Pos of Pro Otonomi (JPIP), Balikpapan, Juli 2004.

_____, 2004, *'Strategi Membasmi Korupsi di Daerah*, makalah disajikan pada tim Peneliti Untuk Penelitian Monitoring Otonomi, The Jawa Pos of Pro Otonomi (JPIP), Semarang, Agustus 2004.

_____, 2007, *'Strategi Menghadapi Perubahan, How Long Can You Go ?*, makalah disajikan dihadapan para Guru dan Pengelola SDK, SMPK, SMAK Frateran di Palembang-Sumsel, Surabaya, Kupang, Waikabubak Sumba Barat Daya, Kupang, Ende, Maumere, dan Larantuka, Juli-Agustus 2007

_____, 2008, *'Rakyat Memilih, Kesiapan Menyongsong Pemilihan Legislatif 2009*, handout disajikan untuk Pembekalan bagi Calon Anggota Legislatif dari Kawasan Utara Kabupaten Ende-Flores, NTT

_____, 2002, *'Tantangan dan Kendala Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah, Pengalaman Universitas Merdeka Malang*, makalah disampaikan pada Lokakarya Service Provider Strategi Pengembangan Gerakan Good Governance di Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah-Depdagri-BUILD UNDP, Cipayung, Bogor, 16-18 April 2002

Plumptre Tim, *'Getting to Good Governance : Overcoming the Hurdles*, Canadian Fundraisers eNews, 2002

Pramusinto, Agus, 2006, ' *Building Good Governance in Indonesia, Cases of Local Government Efforts to Enhance Transparency*, EROPA Conference : Modernising the Civil Society Reform in Alignment with National Development Goals.

Saputra, Rahmat, 1999' *Beberapa Pemikiran Tentang Good Governance*, 'Jurnal Transparansi Online,

Shutmuller, Paul, et. al, 2002, kumpulan makalah *Lokakarya Strategi Mengembangkan Gerakan Good Governance di Daerah*, Cipayung 16-18 April 2002, BUILD INDS/97/018

Sumarti, Hetifah, SJ, 2009, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, 20 *Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor Jakarta.

Sutoro, Eko, *'Modal Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, dalam Analisis CSIS, Volume 33 No. 3, Tahun 2004

Tantowi U, Pramono, dkk, '2004, *'Membasmi Kanker Korupsi*, 'Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, dan Kemitraan, Jakarta

Thich Nhat Tu, 2007, *'Good Governance and the Ideal Society,*'

Thohir Mudjahirin, 2002, *'Tradisi Bermusyawarah, Memusyawarahkan Tradisi*

Tjokroamidjojo, Bintoro, *'Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan.*

Widiadi, Pietra, 2005, *Menerapkan Pendekatan Partisipasi, Berpura-Pura Atau Belajar : Kasus Kabupaten Sidoarjo*, makalah disampaikan pada Forum Nasional FPPM, Senggigi, Mataram, NTB

Widuri Rindang, et.al, *'Analisis Hubungan Peranan Budaya Perusahaan Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Aneka Tambang*, Tbk, 2008

Yudhiantara, M, 2007, *'Good Governance dan Kinerja Biro Racional Kita*, makalah dalam Temu Karya Diklatpim Tkt. II Angkatan XX LAN, 2007

UNDP Policy Document, *'Governance for Sustainable Human Development, Implementation of Governance Programmes*

_____, *Good Governance and Sustainable Human Development*

_____, *UNPD Priorities in Support of Governance*

RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS :

1. Nama Lengkap : Prof. DR. Drs. Bonaventura Ngarawula, MS
2. Tempat/Tanggal Lahir : Mukusaki, Ende-Flores, 28 Juni 1956
3. Agama : Katolik
4. Pekerjaan : Dosen Tetap Universitas Merdeka Malang
5. Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / IV-d
6. Istri : dr. Susilowati, MARS dengan 2 (dua) anak
Eka Nugraha Putra (FH Unibraw) dan
Martha Dewi Caesa Putri (Fakultas
Kedokteran UMM Malang)
7. Alamat Rumah : - Jln. Panji No. 72 Kepanjen, Telp (0341)
395104
- Villa Puncak Tidar Blok i/19, Telp.
(0341) 55676, HP. 081.334.280.988.
Fleksi : (0341) 9289956

II. RIWAYAT PENDIDIKAN :

- a. Sekolah Dasar Katolik, Mukusaki-Ende-Flores NTT (1963-1969).
- b. SMP Katolik Ndao Ende-Flores-NTT, (1970-1972).
- c. SMA Katolik Seminari St. John Berkhmans Mataloko-Ende (1972-1976)
- d. IKIP Negeri Malang, Jurusan Bahasa Inggris, Program S0-1 (1979)
- e. Fakultas Sosial dan Politik Universitas Merdeka Malang, Jurusan Administrasi Negara (1978-1984)
- f. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta-Jurusan Ilmu Politik (1987-1990). Pembimbing I : Dr. Yahya Muhaimin, MA dan Pembimbing II : Dr. Afan Gafar, MA
- g. Program S-3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Airlangga, 1994 - 1998 (sampai Pra Kualifikasi). Tahun 1998-2004 non aktif.
- h. Melanjutkan kembali Program S-3 Ilmu Sosial Program Pascasarjana Unmer Malang, Lulus Doktor, 14 Desember 2006.

III. PENGALAMAN PROFESIONAL DAN MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI :

Jabatan Yang Pernah Diemban :

- a. Sekretaris BKK Unmer Malang (1986 -1987)
- b. Ka.Sub.Bag. Kesra, BKK Unmer Malang (1987)
- c. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup - Lembaga Penelitian Unmer Malang (1990-1991)
- d. Ketua Lembaga Penelitian Unmer Malang (1991-1999)

- e. Anggota Senat Universitas, Ex-Officio (1991-1999)
- f. Anggota Senat Fakultas (2000 - sekarang)
- g. Anggota Senat Universitas 2008 - sekarang (*ex officio*).
- h. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah 'SCIENCE' Lembaga Penelitian Unmer Malang (1991-1999).
- i. Penanggung Jawab Media Komunikasi Internal 'Warta Merdeka', (1996-2000)
- j. Ketua Bidang Litbang Ikatan Alumni Unmer Malang (1994-1995)
- k. Wakil Ketua II, Ikatan Alumni Unmer Malang (1995)
- l. Seksi Humas/Komunikasi-Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Malang (AIPi - Cabang Malang).
- m. Anggota Tim Technology Park Bappeda-Jawa Timur (1997)
- n. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan Lokal (P4L) FISIP Unmer Malang, 2001-2004 (Non Struktural)
- o. Anggota Tim Ahli/Konsultan The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi-Partnership UNDP Tahun 2004-2005 untuk Survei Publik Pelaksanaan Otda di Propinsi Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- p. Ketua Tim Penyusun Renstra Pusat Unmer Malang (2005-2010), Tahun 2004.
- q. Dosen S-1 FISIP Unmer Malang.
- r. Dosen Tamu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Flores Ende - NTT
- s. Dosen S-2 Program MAP Pascasarjana Unmer Malang.
- t. Dosen S-3 Ilmu Sosial Pascasarjana Unmer Malang

IV. DESKRIPSI PENGALAMAN PROFESIONAL :

Selama Menjabat Ketua Lembaga Penelitian Unmer Malang (1992-1999) :

- Mengadakan Kerjasama di Bidang Penelitian, dengan The University of Western Australia, Perth dalam Bidang : *Capacity Building and Technical Assistance on Research Methodology : Stage I, II, III and IV.* (Setiap Stage/Angkatan, mengikutsertakan 30 Dosen)
- Mengadakan Kerjasama di bidang Penelitian dan Penulisan Buku dengan The Philippine Christian University (PCU).
- Menjajagi Kerjasama Pengembangan Potensi Agroindustri di IBT, bersama Erasmus University dengan sponsor European Community (EC). (*Erasmus University mengirimkan seorang ekspertnya untuk Penyusunan Kerangka Kerjasama Penelitian bersama Tim Lembaga Penelitian Unmer Malang ,Unmer Malang mengirimkan seorang dosen FE mengikuti Short Course Management di Erasmus University Rotterdam*).
- Secara rutin mengadakan Kerjasama di Bidang Penelitian dan

Pengembangan Program Ketenagakerjaan dengan Depnaker RI (*Memperoleh Bantuan Dana Penelitian Setiap Tahun, terhitung Mulai Tahun 1992/1993 hingga 1997/1998. Penelitian diadakan pada beberapa propinsi antara lain : Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB dan NTT.*

- Mengadakan Kerjasama dengan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Dalam Rangka Seminar Kemitrasejajaran Wanita dan ditindaklanjuti dengan Penelitian Peranan Wanita melalui DP3M Dikti.
- Menjalin Kerjasama serta Mengikuti Kompetisi Seleksi Proposal Penelitian dengan DP3M Dikti, untuk Pengajuan Proposal-Proposal Penelitian Hibah Bersaing, Doktor Baru, Peneliti Muda, Penelitian Studi Wanita dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar. (*Dan berhasil mendapatkan Dukungan Dana dan Sejumlah Hasil Penelitian PHB, Doktor Baru, Peneliti Muda, Studi Wanita dan Ilmu Pengetahuan Dasar*).
- Menjalin Kerjasama dengan Komite Nasional UNESCO Jakarta, dalam Rangka Seminar Nasional tentang : "*Manajemen Pendidikan Tinggi dan Menuju Pendidikan Tinggi Yang Bermutu*" (1996).

V. PENELITIAN YANG PERNAH DILAKUKAN : SEBAGAI KOORDINATOR, ANGGOTA TIM MAUPUN INDIVIDU :

1. Studi Empirik : Pengaruh IQ Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (*Anggota - FISIP Unmer Malang-1985*)
2. Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Desa (*Peneliti Utama - Fisip Unmer Malang, 1987*)
3. Pentingnya Koordinasi Dalam Pembangunan Desa (*Peneliti Utama, Fisip Unmer Malang 1989*)
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas UU No.5 Tahun 1979 (*Anggota-Fisip, 1991*)
5. Fungsi BPP KUD, Pada Koperasi Unit Desa di Propinsi Dati Jawa Timur (*Anggota, Bappeda Tkt. I Jatim-Lembaga Penelitian Unmer Malang, 1991*).
6. Prospek dan Tantangan Usaha mandiri dan Sektor Informal (*Penanggungjawab/Koordinator, Ketua, Barenbang Depnaker RI-Lembaga Penelitian Unmer Malang, Propinsi Jatim, NTT, Kalimantan Selatan, Lampung, 1992*).
7. Mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Tengah, Lampung, Jatim dan Jabar. (*Penanggungjawab/Koordinator, Anggota-Barenbang. Depnaker RI-Lembaga Penelitian Unmer Malang, 1993*).
8. Kesiapan Masyarakat Dalam Rangka Program Wajib Belajar

- Pendidikan Dasar 9 Tahun, (*Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Tengah dan Kawasan Kepulauan di wilayah Kabupaten Sumenep-Jatim*) (Penanggungjawab/Koordinator-Anggota, Lembaga Penelitian, 1993).
9. Respons Masyarakat Terhadap Peran Universitas Merdeka Malang Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (Penanggungjawab/Anggota, 1994 - Lembaga Penelitian Unmer Malang).
 10. Daya Serap Alumni Universitas Merdeka Malang Pada Dunia Kerja (Studi tentang Daya Serap Alumni Unmer Malang di Jawa Timur) (Penanggungjawab/Anggota-Lembaga Penelitian Unmer Malang).
 11. Kesenjangan Antara Produk Pendidikan Dengan Kebutuhan Dunia Kerja (Penanggungjawab/Ketua, *Harian Kompas-Lembaga Penelitian Unmer Malang* (1994)
 12. Menuju Manajemen Perguruan Tinggi Yang Efisien (Penanggungjawab/Koordinator, *Anggota Lembaga Penelitian Unmer Malang*, 1995)
 13. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kawasan Penyangga Bromo-Tengger-Semeru. (Penanggungjawab/Koordinator *Bappeda Tingkat II, Kabupaten Malang-Lembaga Penelitian Unmer Malang*, 1995)
 14. Studi Kompetisi Sektoral Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Propinsi DKI Jakarta, Jatim, Bali dan Lombok-NTB, 1997 (Penanggungjawab/Anggota, *Barembang Depnaker RI-Lembaga Penelitian Unmer Malang*).
 15. Manfaat Pemagangan bagi Peserta dan Perusahaan di Industri Pengolahan, Studi di Propinsi Kaltim, Jabar, Jateng, DKI Jakarta, Bali dan Jatim (Penanggungjawab/Anggota, *Barembang Depnaker RI-Lembaga Penelitian Unmer Malang*, 1996).
 16. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Industri Kecil, Studi di Propinsi Jateng dan Jatim (Penanggungjawab/Anggota, *Barembang. Depnaker RI-Lembaga Penelitian Unmer Malang*).
 17. Program Pembinaan Keluarga Pra Sejahtera Melalui Model Pemberian Bantuan Sarana Usaha (Ketua/Peneliti Utama-DP3M Dikti, 1998)
 18. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Produk Unggulan Daerah Sebagai Model Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Tulungagung (Penanggungjawab/Anggota, *Bina Sosial Pemda Tingkat I Jatim-Lembaga Penelitian Unmer Malang*, 1999/2000)
 19. Sigi Informasi Daya tarik Mahasiswa Baru Universitas Merdeka Malang. (Penanggungjawab/Anggota-Lembaga Penelitian Unmer Malang, 1999)
 20. Sigi Layanan Akademik Mahasiswa Universitas Merdeka Malang (Penanggungjawab/Anggota-Lembaga Penelitian, 1999).
 21. Sosialisasi Pembentukan Sentra Industri Kecil di Kotamadya Dati II

- Malang (*Anggota-Bappeda Dati II Kodya Malang-Lembaga Penelitian Unmer Malang, 2000*).
22. Analisis Pemberdayaan Industri Kecil Melalui Pelatihan dan hibah Teknologi Pemisah Serabut Kelapa pada Kelompok Pengrajin Serabut Kelapa di Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung (*Anggota-Bappeda Tingkat I Jatim-Lembaga Penelitian Unmer Malang 2000*)
 23. Identifikasi Potensi Riil Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Probolinggo (Tahun 2000) (*Ketua Peneliti*)
 24. Pelatihan Sistem Akutansi Keuangan Daerah Dalam Rangka Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Kota Probolinggo (2001) (*Ketua Peneliti*)
 25. Penyusunan Sistem Akutansi Keuangan Daerah, dalam Rangka Penerapan Good Governance di Kota Probolinggo (2001) (*Ketua Tim*)
 26. Studi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Income Daerah Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kota Probolinggo Tahun 2002. (*Ketua Peneliti*)
 27. Studi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Income Daerah Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan (*Ketua Peneliti*)
 28. Studi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Income Daerah Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kabupaten Sumenep Madura Tahun 2003. (*Ketua Peneliti*)
 29. Studi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Income Daerah Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kota Probolinggo Tahun 2004. (*Ketua Peneliti*)
 30. Analisis Job Deskripsi Pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003). (*Ketua Peneliti*)
 31. Melaksanakan Kegiatan Outbound bagi Aparat Pemerintah Kota Probolinggo kerjasama *Pemkot Probolinggo dengan P4L FISIP Unmer Malang (2003)*
 32. Melaksanakan Kegiatan Outbound bagi Aparat Pemerintah Kota Malang, kerjasama *Pemkot Malang-P4L FISIP Unmer Malang (2004)*
 33. Pemetaan Potensi dan Prospek Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumenep-Madura, (*Ketua Tim*) *Kerjasama LP3L-Pemerintah Kabupaten Sumenep., Tahun 2004.*
 34. Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur, 2004, (*Ketua Peneliti*) *kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur - LP3L Malang.*
 35. Konsultan untuk Penelitian tentang Survai Publik Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di *Propinsi Kaltim, Jawa Tengah dan DIY*, kerjasama dengan *The Jawa Pos of Pro Otonomi, Partnership-UNDP, dalam Rangka Pemberian Otonomi Award Tahun 2005/2006*

VI. MAKALAH-MAKALAH YANG PERNAH DIPRESENTASIKAN :

1. Tingkat Lokal/Regional :

- a. Beberapa Isue dan Esensi Desentralisasi, Kendala dan Prospeknya Menuju Pembangunan Daerah Yang Lebih Mandiri (*Pidato Dies Natalis Unmer Malang XXVI, 1991*)
- b. *Irak-Kuwait : Beberapa Persoalan Global*, Disajikan pada Seminar Sehari Fordimapelar Mahasiswa Unmer Malang, 26 November 1990.
- c. Pemilihan Umum dan Partisipasi Masyarakatnya, *Diskusi Fordimapelar Unmer Malang, 1992.*
- d. Format Politik Masyarakat Baru : Menuju Masyarakat Baru Jawa Timur, (*Diskusi Panel dalam rangka Sumbangan Pemikiran kepada Pangdam V/Brawijaya, September 1998.*)
- e. Kesiapan Masyarakat dalam Menyongsong UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (*Dipresentasikan di Universitas Muhamadiyah Malang, Pada Seminar tentang Sosialisasi UU No. 22 Tahun 1999 kerjasama Universitas Muhamadiyah Malang-Bappeda Kota Malang di Unmuh Malang, Pebruari 2000*)
- f. Respons Masyarakat Terhadap UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah (*Dipresentasikan pada Forum Diskusi Dosen FISIP Unmer Malang,*
- g. Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi, *Dipresentasikan pada Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Juli 2003.*
- h. Penyusunan Perencanaan Strategis Kabupaten Probolinggo. *Dipresentasikan Pada Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo*
- i. *Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Renstra Kabupaten Probolinggo*, bersama Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Hotel Pelangi Malang, 2003.
- j. *Tim Pendamping Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Ngawi, Tahun 2001.*
- k. Optimalisasi Peran DPRD dan Kesiapan Menghadapi Masalah Pemutusan Hubungan Kerja. *Dipresentasikan pada Komisi C DPRD Kabupaten Pasuruan, Juli 2004*
- l. Memberikan Pelatihan Mengenai Usaha Mandiri kepada Kelompok Kerja Mandiri di Kota Malang kerjasama LP3L Malang dengan *Disnaker Kota Malang, Juli 2004*
- m. Memberikan Pelatihan Mengenai Usaha Mandiri kepada Kelompok Kerja Mandiri, kerjasama LP3L Malang dengan *Disnaker Kota Malang, 2005*
- n. Menjadi Narasumber dalam beberapa kali Dialog Interaktif mengenai Isu-Isu Lokal dan Nasional bersama *RRI Malang dan Radio Andalus FM.*

2. Tingkat Nasional :

- a. *Desa Mandiri : 'Beberapa Kendala dan Prospeknya', disampaikan pada Seminar Nasional tentang 'Optimalisasi Peran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan' Dibuka dan dihadiri Mendagri Rudini, Unmer Malang, 1992)*
- b. *Seminar Nasional tentang Kebijakan Program Penelitian Melalui Pendanaan dari DP3M Dirjen Dikti dan Prosedur Pengajuannya. Diselenggarakan oleh Universitas Gajayana Malang 12 Mei 1999.*
- c. *Peran Perguruan Tinggi Di dalam Pelaksanaan Pirnsi-Pirnsip Good Governance, dipresentasikan pada Forum Build-UNDP di Hotel Kaisar, Jakarta, 2003..*
- d. *Peran Perguruan Tinggi dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance, dipresentasikan pada Sosialisasi Good Governance di Jawa Timur, kerjasama dengan BUILD-UNDP, dan Pemkot Batu, Tahun 2004.*
- e. *Korupsi di Daerah Pasca Pelaksanaan Otonoda, disampaikan pada Pelatihan bagi Tim Peneliti Evaluasi Otonoda Kerjasama The Jawa Pos of Pro Otonomi (JPPI), Partnership-UNDP dengan Propinsi Kalimantan Timur, di Balikpapan, Juli 2004.*
- f. *Korupsi di Daerah dan Upaya Penanggulangannya Pasca Pelaksanaan Otonoda, dipresentasikan pada Tim Peneliti Survei Pulbik Tentang Pelaksanaan Otonoda kerjasama The Jawa Pos of Pro Otonomi (JPPI)-Pertnership UNDP dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan DIY, di Semarang, Oktober 2004.*

3. Tingkat Internasional :

- a. *The Role of Higher Education in Environmental (ASAIHL Seminar, May 6-8, 1991, Airlangga University-Surabaya Indonesia)*
- b. *The Developing of University Insight in Responding of Environmental Problems, (ASAIHL Seminar and Conference (Griffith University Brisbane-Queensland, Australia, 6-8 July, 1993).*
- c. *The Condition of Indonesian Higher Education Approaching Globalizaiton, International Conference on University Teaching and Learning for Tonorrow's World The Asia-Pacific Experience. (Brawijaya University- Curtin University of Tehcnology and The John Curtin International Institute, Perth Australia, 27-29 August 1997).*
- d. *The East Java Experience on Small Scale Industry : From The One Village One Product Through The Tehcnology Park, Hand Out A Guide for Discussion, Western Australia Trade Department and East Java Province, Perth-Australia, February, 16-18, 1997).*

VII. PENGALAMAN MENGELOLA MEDIA DI PERGURUAN TINGGI DAN MEDIA UMUM/NON PERGURUAN TINGGI :

1. Sejak Mahasiswa Aktif di bidang jurnalistik dan Mendirikan Koran Kampus *CIVITAS*.
2. Mendirikan dan menerbitkan Jurnal Ilmiah *SCIENCE* Universitas Merdeka Malang
3. Merintis dan Menerbitkan Media Internal *WARTA MERDEKA Unmer Malang*
4. Merintis dan Menerbitkan Media Internal *BERITA FISIP* Unmer Malang
5. Konsultan dan Kepala Biro Malang, *Tabloid Kalimantan Bisnis*, Tabloid Bisnis Kalimantan, 2005
6. Pemimpin Redaksi *Majalah Keluarga Katolik KANA*, diterbitkan oleh Serikat Sabda Allah atau Societas Verbi Divini (SVD), Malang.

VIII. KARANGAN ILMIAH DAN JURNAL YANG DIPUBLIKASIKAN :

1. Makna dan Fungsi Institusi Negara Bagi Masyarakat Lokal di desa Peniwen Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, diterbitkan *JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN PENGAJARANNYA*, Terakreditasi SK Dirjen Dikti No.34/DIKTI/Kep/2003, Tahun 39 Nomor 1, Maret 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
2. Kajian tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Income Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diterbitkan oleh *Journal of Economics Studies*, *MEDIA EKONOMI*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Terakreditasi, SK Dirjen Dikti Nomor : 34/DIKTI/Kep/2003, Volume 14 Nomor 21 Tahun 2004.
3. Profil Income Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Tahun 2002, di Kabupaten Barito Kuala, diterbitkan oleh *Jurnal KEBIJAKAN PUBLIK Program MAP Pascasarjana Unmer Malang*, Volume 1 No.2 Desember 2004. ISSN 1893-7252
4. Kajian Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, diterbitkan *Jurnal Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang*, Volume XVI Nomor 1 Tahun 2005, ISSN 1410-7295
5. The Role of Environmental Education in Developing Environmental Awareness, *SCIENCE*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Merdeka Malang*, Nomor 20 Agustus 1993, ISSN 0853-1218
6. Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Melalui Model Pelatihan di Kabupaten Sumenep, diterbitkan oleh PUBLISIA, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 8, Nomor 1, April 2004, ISSN 1410-0983 Laboratorim Kebijakan Publik FISIP Universitas Merdeka Malang,

7. Condition of Indonesian Higher Education Approaching Globalization (Several Findings of Research), *Proceedings, International Conference on University Teaching and Learning for Tomorrows World, The Asia Pacisific Experiences, Malang Indonesia, Brawijaya University, Curtin University of Technology, The John Curtin University of Technology, Perth Australia, 1997*
8. Menterjemahkan Buku : *The History and Philosophy of Social Science,* Karangan Scott Gordon, Routledge London, New York, 1991 diterjemahkan tahun 1998, tidak dipublikasikan)
9. Menterjemahkan Buku : *'Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,'* karangan Benedict Anderson, Rev.Ed.1991, London New York Verso, diterjemahkan Tahun 1995. Tidak dipublikasikan.
10. Koordinator Penulisan Rumusan Hasil Diskusi Panel *'Menuju Masyarakat Baru Jawa Timur'*, Sumbangan Pemikiran Unmer Malang kepada Pangdam V/Brawijaya, 1998.
11. Koordinator Penulisan Buku/Rumusan Hasil Seminar Nasional *'Membangun Daya Saing Bangsa' Hasil Seminar Nasional Menuju Mutu Pendidikan Tinggi, kerjasama Komite nasional UNESCO Jakarta-Unmer Malang, 1997.*

IX. TULISAN ILMIAH POPULER (Jawa Pos, SURYA, Tabloid Ekonomi Kalimantan Bisnis, Suara Indonesia dan Flores Pos) :

1. Sosok Kerjasama ASEAN : Kendala dan Prospeknya di bidang Politik, *dimuat di Harian Suara Indonesia, 1987.*
2. Wajib Militer, Pembinaan Watak dan Disiplin Nasional, *dimuat di Harian Suara Indonesia, 1987.*
3. Pengawasan Melekat dan Birokratisasi, *dimuat di Harian JAWA POS, 1989.*
4. Beberapa Aspek Birokrasi dan Hambatannya, *dimuat di Harian SURYA 1993.*
5. Nubuat Ben Anderson, 1994, *dimuat di Harian SURYA, 1994.*
6. Universitas Bertaraf Internasional, Seperti Apa ? *dimuat di Harian Jawa Pos-Radar Malang, 23 Juli 2005*
7. Catatan Perjalanan ke Beijing dan ShangHai Warisan Budayanya Tetap Dijunjung Tinggi, *dimuat di Harian Jawa Pos-Radar Malang, 22 Juli 2005*
8. Perguruan Tinggi dan Pseudo Democracy, *dimuat Jawa Pos-*

- Radar Malang, 4 Januari 2006.*
9. Rektor, Koran dan News Maker, *dimuat di Harian Jawa Pos - Radar Malang, 28 Desember 2005*
 10. Setelah Alun-Alun Junction Batal, *dimuat di Harian Jawa Pos-Radar Malang, 15 November 2005*
 11. Belajar dari Singapura Menjual Wisata, *dimuat di Harian Jawa Pos-Radar Malang, 12 Juli 2005*
 12. Optimalisasi Peran DPRD dalam Rangka Otonomi Daerah, *dimuat di Tabloid Kalimantan Bisnis, Edisi September 2006.*
 13. Korupsi di Daerah dan Upaya Mengatasinya, *dimuat di Tabloid Kalimantan Bisnis, Edisi November 2006.*
 14. Analisis Ekonomi Politik Jawa Timur 2007, *Kalimantan Bisnis, Edisi Desember 2006.*
 15. Catatan Perjalanan ke Beijing dan Shang Hai Warisan Budayanya Tetap Dijunjung Tinggi, *dimuat di Harian Radar Malang, Jawa Pos, 22 Juli 2005*
 16. Perguruan Tinggi dan Pseudo Democracy, *dimuat di Radar Malang Jawa Pos, 4 Januari 2006.*
 17. Rektor, Koran dan News Maker, *dimuat di Harian Radar Malang Jawa Pos, 28 Desember 2005*
 18. Belajar dari Singapura Menjual Wisata, *dimuat di Harian Radar Malang Jawa Pos, 12 Juli 2005*
 19. Optimalisasi Peran DPRD dalam Rangka Otonomi Daerah, *Tabloid Kalimantan Bisnis, Edisi September 2006.*
 20. Korupsi di Daerah dan Upaya Mengatasinya, *Tabloid Kalimantan Bisnis, Edisi November 2006.*
 21. Otonomi Untuk Rakyat (Menyongsong Pilkada di NTT) *dimuat di Harian Flores Pos Ende, 12 Maret 2007*
 22. Mematok Brand Image Dengan Menu Khas Lokal, *dimuat di Harian Flores Pos, tanggal 5 April 2007*
 23. Dimensi Krusial dan Peran Strategis DPRD, *dimuat di Harian Flores Pos, 11 April 2007.*
 24. Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar Otoda, *dimuat di Harian Flores Pos, 14 Januari 2008*
 25. Menulis Tajuk Rencana, dengan Judul Sistem Ekonomi Rumah Tangga, Perlukah, *Majalah Keluarga Nasional KANA, Edisi Juli 2007.*
 26. Menulis Tajuk Rencana, dengan Judul Dipanggil Untuk Merdeka, *Majalah KANA Edisi Agustus 2007*
 27. Menulis Tajuk Rencana, dengan judul Komunikasi dan Harmoni Keluarga, *Majalah KANA, Edisi Oktober 2007*
 28. Menulis Tajuk Rencana dengan judul, Keluarga dan Lingkungan, *Untuk Majalah KANA, Edisi November 2007*
 29. Menulis Tajuk Rencana dengan Judul "Kemiskinan dan Pengasuhan Anak," *Majalah Nasional KANA, Januari 2008.*
 30. Artikel Opini dengan Judul Keluarga Miniatur Demokrasi Ekonomi

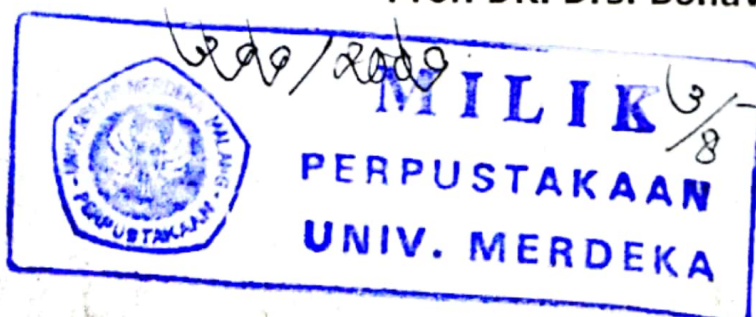
- Majalah Nasiona Keluarga KANA, Juli 2007
31. Artikel Opini dengan Judul Komunitas Khayalan, Majalah Keluarga KANA, Agustus 2007
 32. Artikel Opini dengan Judul Keluarga Cermara, Majalah Keluarga Kana, Novermber 2007
 33. Artikel Opini dengan Judul Sumbawa, Pesona Sun Set dan Ikan Bakar Gua Tanjung Pengawas, Majalah KANA Edisi Desember 2007

X. KUNJUNGAN LUAR NEGERI : (Australia : Brisbane, Gold Coast, Canberra, Sydney dan Perth, Singapura, Tiongkok : Beijing dan Shang Hai)

1. Menghadiri Seminar dan Konferensi Internasional dengan Tema, Pendidikan Tinggi dan Lingkungan Hidup, di Griffith University Brisbane, Queensland, Australia. 1993.
2. Melakukan kunjungan ke The University of Queensland dan The Queensland University of Technology (QUT), di Brisbane Australia, Juli 1993.
3. Kunjungan dan Studi Pustaka di bidang Penelitian dan Pendidikan Pengajaran, di Australian National University (ANU), Canberra, November 1995. (diterima dan bertemu dengan Chris Manning dan Harold Grough)
4. Kunjungan ke The University of Sydney, The University of New South Wales dan Maquary University, Sydney, Oktober 1995.
5. Studi Banding bersama Tim Bappeda Tingkat I Jawa Timur, mengenai Model Pengembangan Technology Park, di Perth, Australia Barat, 16 s/d 18 Pebruari 1997.
6. Kunjungan ke The University of Western Australia, Perth dan Murdoch University, Perth Western Australia, 18 s/d 20 Pebruari 1997.
7. Melakukan Kunjungan ke Singapura pada awal bulan Juli 2005 Kunjungan ke Beijing dan Shang Hai, akhir Juli 2005

Malang, Juli 2009

Prof. DR. Drs. Bonaventura Ngarawula, MS





Prof. DR. Drs. Bonaventura Ngarawula, M.S. (ngarawula28@yahoo.com dan bona_kana@yahoo.com), lahir di desa Mukusaki Ende Flores NTT, 28 Juni 1956. Menyelesaikan SMPK Ndao Ende Flores (1972), SMAK Seminari St. Yohanes Berkhmans Mataloko (1976), S-1 Bahasa Inggris IKIP Malang (1979), Sarjana Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Politik Unmer Malang (1984), S-2 Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991), S-3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya hingga Penyusunan Pra Proposal (2004) dan menyelesaikan disertasi dengan topik 'Makna Nasionalisme Komunitas Lokal

(Kajian Teoritik Tentang Pemahaman Nasionalisme Pada Masyarakat Lokal di Desa Peniwen Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang) di Pascasarjana S-3 Ilmu Sosial Unmer Malang. Ketika mahasiswa, aktif mengelola pers kampus, mendirikan CIVITAS Koran kampus Unmer Malang (1985). Sebagai dosen, merintis diterbitkannya Jurnal SAINS Lembaga Penelitian Unmer Malang, dan buletin Warta Merdeka Media Internal Unmer Malang. Aktif menulis di berbagai media antara lain Jawa Pos, Radar Malang, Surya, Flores Pos, dan Kalimantan Bisnis. Pernah menjabat beberapa posisi di bidang kemahasiswaan tahun 1986-1988. Tahun 1992-2000 menjabat sebagai Kepala lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang. Selama menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian aktif menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam negeri dengan sejumlah instansi pemerintah seperti Depnaker RI, DP2M Dikti, Dewan Riset nasional, Dirjen Unesco, BUILD UNDP, Partnership/Kemitraan/JPIP, serta sejumlah Pemerintah Kabupaten dan Kota Daerah di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTT, NTB, dan BUILD UNDP. Kerjasama luar negeri dengan The Philippine Christian University, Erasmus University Rotterdam. Dalam rangka tugas akademik, sudah mengunjungi beberapa perguruan tinggi di Australia, seperti The University of Queensland, Griffith University (menyajikan makalah dalam Seminar ASAIHL tentang The Role of the Higher Education in Promoting the Environmental Problems, 1993), dan QUT (Queensland University of Technology), The Australian National University (ANU) di Canberra, Sydney University, The University of New South Wales, Macquarie University di Sydney (dalam rangka menjajagi kerjasama di bidang riset, 1995), Curtin University of Western Australia, Murdoch University, dan Curtin University of Technology di Perth, Western Australia (selaku anggota Tim Technology dan bersama Bappeda Propinsi Jawa Timur, 1998), terakhir ke Singapura (2005) dan Beijing (Beijing dan Shang Hai, 2005). Tahun 2004, menjadi tim ahli pada The Jawa Pro Otonomi (JPIP) untuk Penelitian tentang Survai Publik Kemajuan dan Ketahanan Masyarakat Propinsi Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan DIY, anggota Tim Ahli BUILD UNDP Provider Jawa Timur (2000-2004). Saat ini selain aktif mengajar S-1 Jurusan Administrasi Negara FISIP Unmer Malang, S-2 MAP Pascasarjana Unmer Malang, dan S-3 Ilmu Sosial Pascasarjana Unmer Malang, juga sebagai dosen tamu di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Flores-Ende-NTT. Selain tugas-tugas di bidang akademik, saat ini juga membantu menerbitkan Majalah Keluarga sebagai Pemimpin Redaksi sejak tahun 2007 hingga sekarang.



399/09